

Dinamika Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Endemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun 2022

Ridwan Aulia Nur Fathurrohman^{1*}, Dian Suluh Kusuma Dewi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

*Email Korespondensi: ridwannur4929@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the dynamics of the government in dealing with endemic cases of foot and mouth disease in Indonesia that will occur in 2022. The method used is a literature review approach. Literature review has several purposes, namely to inform readers about the results of other studies that are closely related to current research, to link research with existing literature, and to fill gaps in deficiencies in previous research. The results of this study indicate that the government has made many efforts to tackle FMD cases, including administering vaccines evenly, conducting biosecurity, treating animals exposed to FMD, conducting tests and tests, and slaughtering livestock that have been exposed to the disease. This is done to rebuild the Indonesian economy which was devastated by FMD, especially for breeders. The conclusion of this article is that the Indonesian government has succeeded in finding a strategy to tackle and reduce FMD endemic cases. Efforts that have been made by the government to minimize large-scale risks related to matters affected by FMD endemic.*

Keywords: *Policy, Government, Food and Mouth Disease (FMD).*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemerintah dalam menangani kasus endemik penyakit mulut dan kuku di Indonesia yang terjadi di tahun 2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan *literature review*. *Literature review* memiliki beberapa tujuan, yakni memberitahukan kepada pembaca tentang hasil penelitian – penelitian lain yang terkait erat dengan penelitian saat ini, untuk menghubungkan penelitian dengan literature yang ada, dan untuk mengisi celah kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam menanggulangi kasus penyakit PMK antara lain dilakukannya vaksin secara merata, dilakukannya biosekuriti, mengobati hewan terpapar PMK, melakukan pengujian dan tes, serta dilakukannya penyembelihan hewan ternak yang telah terpapar penyakit. Hal ini dilakukan untuk kembali membangun perekonomian Indonesia yang sempat porak-poranda akibat penyakit PMK ini terkhusus bagi para peternak. Kesimpulan dari artikel ini yaitu pemerintah Indonesia telah berhasil menemukan strategi dalam menanggulangi dan mengurangi kasus endemik PMK. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah meminimalkan resiko skala besar terkait hal-hal yang terdampak dari endemik PMK.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintahan, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan aspek yang terus menjadi perhatian karena berperan penting dalam memberikan nutrisi protein hewani. Swasembada daging yang masih dicita-citakan merupakan upaya untuk menjamin ketahanan pangan rakyat. Keberlanjutan suatu peternakan tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peternakan baik itu secara eksternal maupun internal (Farda et al., 2022). Namun, beberapa peternak, khususnya peternak sapi di Indonesia, mengkhawatirkan persebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang semakin meluas atau bisa disebut juga *Foot Mouth Disease* (FMD). Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus akut terkhusus pada hewan berkuku genap atau belah (*cloven-hoofed*) sangat menular. Penyakit PMK ditandai adanya suatu pembentukan vesikel/mlepuh dan adanya erosi di lidah, mulut, puting, nostril dan kulit di bagian-bagian kuku. Hewan yang mudah terjangkit PMK antara lain hewan berjenis ruminansia (sapi, domba, kambing, kerbau, rusa), babi, unta serta hewan-hewan liar yang lain dengan jenis tertentu (Humas Undip, 2022).

Gejala klinis penyakit mulut dan kuku berbeda pada setiap hewan-hewan yang terjangkit. Virus penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi sangat terlihat. Mengutip penjelasan di laman Ditjen PKH Kementan, sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku memiliki ciri-ciri atau gejala demam

tinggi, sapi menjadi lemas, terlihat tidak nafsu makan atau justru tidak mau makan bahkan ada beberapa sapi masih mau makan tetapi kesulitan mengkonsumsi makanan diakibatkan mulut dan lidah hewa yang terjangkit PMK melepuh, sehingga berpengaruh terhadap produksi susu (pada sapi perah) (Jenderal et al., 2019). Selain peningkatan air liur secara signifikan, hewan sapi memiliki gelembung berisikan cairan hidung, gusi (mulut), lidah, kuku kaki hewan, dan ambing. Pedhet (anak sapi) bisa mati mendadak akibat terjangkit infeksi virus PMK. Selain itu, gejala yang ditimbulkan penyakit, mulut dan kuku pada hewan domba dan kambing tidak separah pada hewan sapi. Domba dan Kambing muda yang terinfeksi penyakit ini bisa mati mendadak tidak seperti kambing dan domba dewasa. Gejala yang terjadi pada hewan domba dan kambing antara lain munculnya lepuh kecil di sekitar moncong, rongga mulut dan kuku kaki. (Rohma et al., 2022).

Kementerian Pertanian mencatat Indonesia pernah mengalami wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), kasus ini sudah terjadi beberapa kali pada tahun 1887, pada mulanya penyakit terjadi ketika Indonesia sedang mengimpor sapi dari Belanda. Pada tahun 1983 wabah PMK terakhir terjadi di Pulau Jawa, kemudian Indonesia dinyatakan bebas PMK setelah melakukan vaksinasi massal, keputusan menteri pada tahun 1986 nomor 260/1986 dan kemudian di akui oleh Organisasi Dunia untuk Kesehatan hewan (OIE) pada tahun 1990 (Humas Undip, 2022). Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Foot and Mouth Disease (FMD) adalah salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dapat menyebabkan kerugian terhadap sektor ekonomi dan masyarakat menjadi cemas, serta meningkatkan kasus kematian hewan (sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2014 terhadap Pengendalian serta Penanggulangan Penyakit Hewan). Virus foot-and-mouth disease (FMDV) termasuk pada genus Aphotavirus, keluarga Picornaviridae, adalah penyebab PMK. Picornavirus masuk dalam klasifikasi IV virus dan memiliki genom RNA untai tunggal berpolaritas positif. Virus ini ada 7 strain, yakni O, C, A, Asia 1, SAT3 (Wilayah Afrika Selatan), SAT 1 dan SAT 2.. (Rohma et al., 2022). Setelah itu, dilaksanakan imunisasi secara terus menerus dalam 3 tahun sampai berhasil menghilangkan virus tersebut dan kemudian dinyatakan terhindar PMK pada Resolusi OIE No. 1/2019.. XI tahun 1990 (Distapangan Provinsi Bali, 2022) Tahun 2013, pemerintahan Indonesia mengumumkan penyakit mulut dan kuku sebagai penyakit hewan menular strategis (PHMS) wajib dihindari serta diwaspadai. Resolusi OIE (Office International Des Epizooties) No. XV tahun 2019 menyatakan bahwa tanpa vaksin Indonesia masih bebas PMK hingga awal April 2022, namun pada akhir April 2022 terjadi wabah PMK di Jawa Timur.(Detikjatim.com, 2022).

Kasus hewan terjangkit PMK pertama dilaporkan pada 28 April 2022, terjadi di Gresik dengan jumlah kasus sapi potong berjumlah 402 ekor tersebar pada 5 kecamatan serta 22 desa. Wilayah Kabupaten Lamongan pada tanggal 1 Mei 2022 di laporkan terjadi kasus PMK kedua dengan terindikas sapi potong berjumlah 102 terjangkit PMK serta tersebar pada 3 kecamatan dan juga 6 desa (Detikjatim.com, 2022). Akibat dari pelaksanaan kebijakan impor daging dan hewan ternak yang berasal dari negara-negara yang dinyatakan belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). seperti India adalah awal mula kembali mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia (Farda et al., 2022).

Berdasarkan data mula penyebaran PMK selalu meningkat serta terjadi pada kurun waktu yang cepat. Beberapa hewan terjangkit penyakit mulut dan kuku yaitu sapi,domba, kambing, kerbau dan babi (Zali et al., 2022)



Gambar 1, 2, 3, dan 4. Peta kondisi dan penanganan penyakit PMK selama April – Juni 2022.

Sumber data: direktorat kesehatan hewan (2022)

Sampai akhir Juni 2022, tercatat ada 19 wilayah dan 221 kota/kabupaten yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jumlah kasus mencapai 291.538 ekor hewan sakit, 96.060 sembuh, 2.944 dikirim ke rumah potong, dan 1.733 mati. Kabupaten Probolinggo memiliki jumlah kasus penyakit mulut dan kuku tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 11.433 ekor sapi. Tingginya mobilitas hewan, produk, dan manusia dapat menyebabkan penyebaran penyakit secara cepat. Oleh karena itu, pemerintah telah berusaha mencegah penyebaran PMK dengan melakukan vaksinasi pada daerah endemik dan membatasi pergerakan ternak dengan menutup pasar hewan. (Rohma et al., 2022). Selain itu untuk Wilayah Ponorogo terkhususnya wilayah Kecamatan Pudak data persebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di lapangan dengan pendataan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (dispertahanan) masih kacau. Dispertahanan Ponorogo mendata, total sapi yang terjangkit PMK sebanyak 3.997 ekor. Angka kematian 132 ekor dan potong paksa 256 ekor. Sedangkan data dari Posko Penanganan PMK di Kecamatan Pudak, sapi terjangkit PMK sebanyak 4.716 ekor. Angka kematian 230 ekor dan potong paksa 243 ekor. Padahal data tersebut penting untuk mengambil kebijakan soal penanganan. Kepala Dispertahanan Ponorogo. Kasus PMK di Ponorogo terus bertambah hingga tanggal 23 Juni tercatat sebanyak 7.367 ekor sapi terpapar. Sapi mati dan disembelih paksa 509 ekor. Sebagian sudah tertangani oleh dokter hewan dan sebagian belum tertangani dengan tambahan tim relawan ini akan mempercepat penanganan hewan terpapar PMK (radarmadiun.jawapos.com).

Dalam menangani kasus endemic seperti ini, pemerintah diharuskan membuat kebijakan yang tepat agar dapat mengendalikan kasus ini. Pembuatan kebijakan merupakan sebuah tahap dalam siklus hidup kebijakan. Siklus atau tahapan tahapan dari suatu kebijakan pada dasarnya ayitu diulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah. Berdasarkan teori kebijakan menurut James E, Anderson (1979) merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah. Proses dalam memecahkan suatu masalah menurut James E. Anderson yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jadi kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, kebijakan merupakan suatu tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki maksud tertentu guna mengatasi suatu masalah.

Pengembangan study kebijakan khususnya study kebijakan tentang penanganan endemi Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia antara lain, Penelitian pertama yang telah dilakukan oleh (Gabriella G. Mamoto, Ronny Gosal, 2021) Temuan dalam penelitian ini bahwa vaksinasi belum dilaksanakan secara rutin, maksimal, dan tidak sesuai (*Standart Operasional Prosedur*) oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, kemudian juga kurangnya Transparansi dari Masyarakat (Disposisi). Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Rohma et al., 2022) Menemukan bahwa PMK dapat menimbulkan kerugian baik kerugian ekonomi maupun produk peternakan. Untuk menanggulangi PMK diperlukan kolaborasi yang erat antar semua pihak, baik dari peternak, industri ataupun stakeholder dengan pemerintah juga masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran diri juga sangat diperlukan agar semua pihak dapat tanggap dan sigap dalam mengatasi masalah PMK. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Bani & Asruddin, 2022) Menemukan Penyakit PMK dapat menyebabkan dampak kerugian ekonomi serta produk peternakan. Peningkatan pengetahuan sangat penting untuk upaya pencegahan semakin meluasnya peyakit PMK.”

Terdapat perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni terletak pada variabel yang digunakan dan juga metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Gabriella G. Mamoto, Ronny Gosal, 2021) menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, penelitian yang dilakukan oleh Rohma, M. R., & Zamzami, A. (2022) menggunakan metode studi literature rivew sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bani & Asrudin (2022) menggunakan metode naive bayes. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat akan bahaya penyakit mulut dan kuku serta seberapa pentingnya peran pemerintah dalam menanggulangi masalah endemi PMK. Mengacu permasalahan yang ada penelitian ini di lakukan untuk mengulas lebih lanjut terkait dengan dampak yang di timbulkan bagi masyarakat akibat firus penyakit mulut dan kuku ini dan bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi dan mengantisipasi wabah PMK agar tidak menyebar lebih luas. Penelitian terkait PMK belum banyak di lakukan tetapi terdapat penelitian cukup relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang cukup relevan bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan di lakukan. Hal yang di tekankan oleh peneliti yaitu konsep yang digunakan, metode yang di lakukan, hasil dari penelitian, serta relevansinya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan *literature review* dan observasi langsung ke Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu wilayah paling berdampak PMK di Kabupaten Ponorogo. *Literature review* mempunyai beberapa tujuan untuk memberi pengetahuan untuk pembaca dari hasil penelitian lain yang mempunyai kaitan yang erat dengan penelitian yang dilakukan pada waktu itu, mengisi kekosongan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, serta menyambungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, literature assessment berisi rangkuman, ulasan, dan pemikiran penulis terhadap beberapa sumber pustaka (slide, artikel, buku, informasi dari internet, grafik data gambar serta lain-lain) mengenai judul yang diulas (Ishtiaq, 2019). *Study literatur* ini mempunyai arah guna melihat peran pemerintah menangani dan mencegah persebaran penyakit mulut dan kuku terkhusus hewan ternak.

Pengumpulan data menggunakan informasi serta data kaitannya kebijakan pemerintah dan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian terdahulu baik nasional maupun international, buku-buku penunjang, artikel- artikel dan berita dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan kata kunci kebijakan pemerintah serta penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak serta obeservasi ke lapangan secara langsung dengan

Cluster 2 Warna hijau adalah tanda dimana PMK muncul di saat covid-19 sudah mulai mereda. Kasus penyebaran virus PMK ini hampir sama dengan proses penyebaran covid-19, namun PMK hanya terjadi pada hewan saja. Kasus ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat khususnya para peternak yang mengalami kerugian cukup besar. Kejadian ini perlu adanya peran pemerintah dalam menangani kasus PMK agar cepat terselesaikan dan tidak terjadi dampak yang lebih besar lagi.

Cluster 3 Ditandai warna biru me jelaskan resiko hewan terkena PMK yang di pengaruhi oleh usia hewan, spesies hewan, strain virus, dosis paparan, dan kekebalan inan. Tata kelola perawatan hewan harus sangat di perhatikan guna menghindari virus PMK pada hewan ternak dengan management pakan, kandang, dan limbah hewan ternak.

Cluster 4 Berfokus pada peningkatan sumber daya manusia terutama berfokus pada petani dan peternak agar dalam kasus seperti endemik penyakit mulut dan kuku ini tidak salah penanganan dan tanggap untuk pencegah persebaran virus penyakit mulut dan kuku, hal ini penting karena jika para petani dan peternak bisa paham akan bahayanya PMK maka tingkat penurunan ekonomi akibat PMK bisa berkurang.

Cluster 5 Berfokus pada perawatan hewan-hewan ternak yang baik agar hewan ternak tetap sehat dengan cara memperhatikan dengan jelas saat pembelian hewan ternak agar hewan tersebut tidak membawa penyakit yang menyebabkan penularan kepada hewan ternak lainnya, memperhatikan pakan ternak yang mencukupi kebutuhan gizi ternak, memperhatikan tipe kandang yang di gunakan untuk tempat ternak contohnya pada kasus PMK hewan ternak yang terjangkit PMK tidak boleh di jadikan satu kandang koloni, harus di pisahkan agar hdewan yang sehat tidak tertular virus PMK maka pentingnya pengetahuan agar terhindar dari virus penyakit mulut dan kuku.

Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

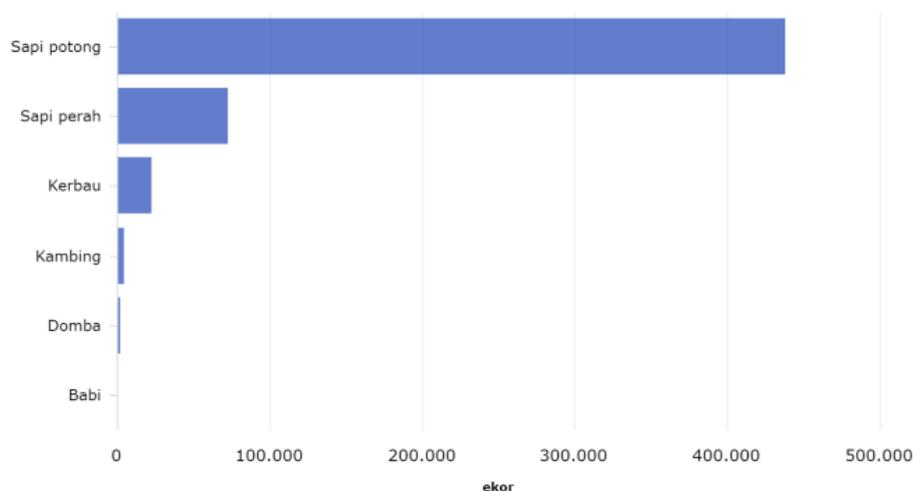
Penyakit mulut dan kuku di masukkan ke dalam daftar penyakit prioritas oleh Kesehatan Hewan Dunia (OIE/*Office des Internationale Epizootis*). Penyakit Mulut dan Kuku ini merupakan penyakit eksotik dari tahun 1990, hingga kini PMK masuk daftar penyakit hewan menular strategis (PHMS). PMK memiliki nama lain yaitu *aphthae epizootica* (AE), dan *foot and mouth disease* (FMD), *aphthous fever* (Diskanak Blora., 2022). Aphthovirus adalah nama virus PMK yang sangat menular. Virus PMK dapat bertahan satu bulan dalam air, pakan, dan di permukaan, menyesuaikan suhu serta kondisi tanah. Mikroba ini bisa bertahan di dalam tubuh serta dalam cairan tubuh seperti air liur, urine, serta tinja dari hewan terinfeksi. Hewan yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit akibat virus ini seperti anjing dan kuda dapat terpapar dan menularkan virus kepada hewan ternak lain yang rentan terinfeksi PMK. Orang yang memakai kembali alat-alat yang telah terkontaminasi virus juga dapat menularkan virus PMK. Terdapat 7 jenis virus terlacak yaitu (O, C, A, SAT3, SAT2, SAT1, dan Asia1) serta lebih dari 60 subtype virus PMK. Kekebalan terhadap satu jenis tidak melindungi hewan terhadap jenis atau subtype lainnya (Fadli, 2022).

Menurut Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan atau *Office Internmational Des Epizooties* (OIE), jenis virus akan memengaruhi tingkat keparahan tanda-tanda klinis atau gejala yang dialami hewan ternak, usia dan spesies hewan dan kekebalan inang serta berapa banyak paparannya. Sapi, kerbau, domba, babi, rusa, unta dan kambing dan juga hewan lainnya yang terjangkit PMK awalnya menunjukkan tanda-tanda gejala seperti demam, enggan bergerak dan mengeluarkan air liur yang banyak. Virus ini juga mengakibatkan terbentuknya gelembung berisi cairan (vesikel) pada lidah, bibir, kaki, langit-langit mulut, dan puting hewan terjangkit. Borok terjadi akibat lepuh pada hewan

yang pecah sehingga memerlukan waktu 10 hari supaya sembuh. Manifestasi yang umum terjadi pada hewan terkena Penyakit Mulut dan Kuku meliputi tidak mau makan, berkurangnya berat badan, menurunnya produksi susu karena mastitis, getaran bibir serta busa di mulut, serta kelainan berjalan.

Diagnosis yang ditegakkan oleh dokter hewan menunjukkan kemungkinan adanya infeksi virus Penyakit Mulut dan Kuku. Akan tetapi, virus PMK sering kali sulit dibedakan dengan penyakit pada hewan lain, Karenanya tes laboratorium diperlukan guna mengenali virus ini. Keberadaan virus Penyakit Mulut dan Kuku dapat dibuktikan dengan cara isolasi kultur sel, uji fiksasi komplemen, ELISA atau metode *polymerase chain reaction* (PCR) yang lebih baru (Fadli, 2022).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, jumlah hewan terkena penyakit mulut dan kuku di Indonesia mencapai 538.354 ekor per Kamis, 22 September 2022. Dari keseluruhan kasus ini, 419.726 hewan ternak berhasil sembuh, 11.796 ekor potong bersyarat, 97.790 ekor masih dalam tahap penyembuhan, dan 9.042 ekor ternak mati karena PMK. Indonesia mempunyai 17 provinsi masih terdampak wabah PMK sampai kini. Jawa Timur tercatat jumlah kasus terbanyak, yakni 186.754 kasus. Per tanggal 22 September 2022, hewan terinfeksi PMK di antaranya sapi potong sebanyak 437.442 ekor, sapi perah sebanyak 72.359, kerbau sebanyak 22.326 ekor, kambing sebanyak 4.230 ekor, domba sebanyak 1.909 ekor, dan babi sebanyak 88 ekor. Untuk menangani wabah ini, pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap 2.837.759 ekor hewan ternak sampai kini. (Mutia, 2022).

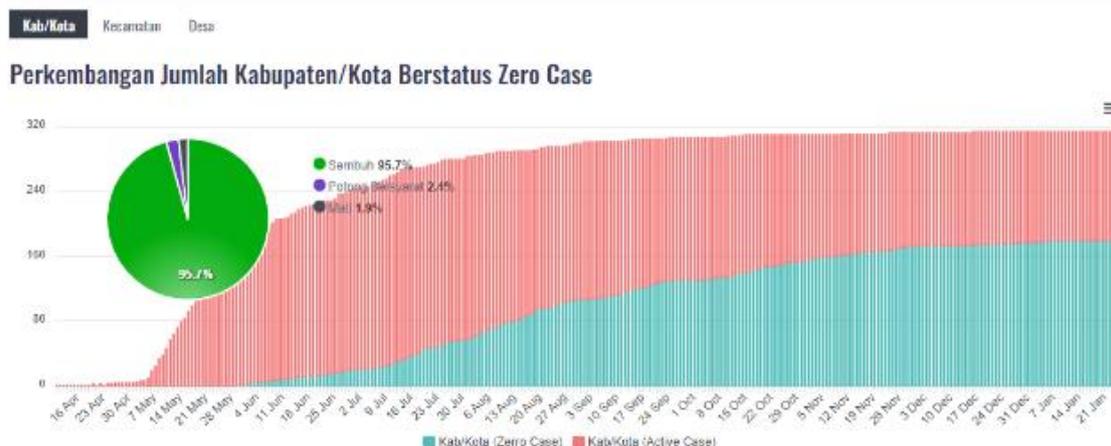


Gambar 6. Jenis hewan yang terkena PMK dan vaksinasi yang dilakukan pemerintah

Sumber : ditjenpkh.pertanian.go.id

Sejak merebaknya PMK di Indonesia bulan Mei 2022, Kementan telah merumuskan tindakan strategis dengan membentuk Tim Gugus Tugas, pengaturan distribusi sapi, penyaluran obat-obatan serta melakukan vaksin, penggantian hewan, memberikan makanan tambahan ternak, mengadakan pelatihan tenaga kerja serta edukasi. Berdasarkan data Kementan sampai tanggal 23 Desember 2022, terdapat 11 provinsi di Indonesia yang melaporkan tidak ada kasus PMK. Selain itu, jumlah laporan kasus PMK telah menurun sebanyak 99,9% pada puncak kasus yang terjadi pada bulan Juni 2022. Diluar dapat menanggulangi PMK, Kementan berhasil meningkatkan beberapa capaian pada sektor peternakan seperti produksi ekspor, gading, PBD,NTPT, serta investasi (Sudarno, 2022).

Data Nasional Perkembangan Jumlah Area Berstatus Zero Case



Gambar 7. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Berstatus Zero Case

Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)

Dampak PMK

Dari penelitian yang dilakukan Prism (2002) menyatakan kasus PMK berpengaruh pada bisnis ternak (71%), bisnis restoran serta hotel (52%), pada wilayah pertanian (58%), perdagangan (47%), transportasi (42%), industri manufaktur (42%), jasa serta pelayanan (55%), konstruksi (49%) dan bisnis finansial (23%). Karena hilangnya produktivitas susu mengakibatkan kerugian ekonomi dalam kegiatan usaha peternak khususnya pengolahan susu (25% per tahun), perkembangan sapi potong menurun (10% – 20%), kehilangan tenaga kerja (60% – 70%), penurunan fertilitas (10%) serta perlambatan kebuntingan, kematian anak ternak (20% – 40%), dan pengurangan populasi hewan terjangkit sangat akut (Agropustaka, 2022).

Kerugian yang di perkirakan oleh kementan mencapai Rp 9,9 triliun pertahun akibat PMK. Hal diatas belum dikalkulasi dengan tidak sedikitnya dana pengendalian, dampak pada wilayah pengolahan, dampak sektor primer, dampak yang terkait dengan pariwisata dan bukan pertanian, serta akibat hilangnya peluang perdagangan serta kemungkinan terjadi keterpurukan pangan daging sapi di Indonesia. Selain kerugian ekonomi yang terjadi, kerugian sosial juga cukup memprihatinkan. Sekarang di daerah pusat wabah Jawa Timur, sudah beredar isu melalui media sosial masyarakat tidak di perbolehkan mengkonsumsi daging serta susu sapi karena diduga akan tertular. Wabah ini mengakibatkan kecemasan pada konsumen serta peternak hewan”(Wahyudi, 2022).

Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Endemi PMK

Pemerintah pusat akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk menanggulangi masalah penyakit PMK pada hewan ternak hal ini di katakana oleh dirjen peternakan Nasrulloh. Berikut adalah 5 strategi multilevel pada pencegahan dan penanganan wabah PMK hewan ternak :

- a. Biosekuriti
- b. Pengobatan
- c. Pengujian
- d. Vaksinasi
- e. Pengujian dan penyembelihan

Kelima strategi tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengurangi dan meredam kasus PMK yang ada di Indonesia. menindaklanjuti semakin mewabahnya kasus PMK yang telah banyak membuat kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Presiden membuat arahan supaya pemerintah agar segera menetapkan daerah tertular wabah PMK dan pengendaliannya secara mikro. Hal tersebut yang menjadikan dasar dibuatnya peraturan menteri pertanian republik Indonesia nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku dengan tingkat penularan dapat mencapai 100% dan juga dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang sangat besar, sehingga perlunya dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan yang cepat, massif, dan efektif.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, jumlah hewan terkena penyakit mulut dan kuku di Indonesia mencapai 538.354 ekor per September 2022. Sedangkan berdasarkan data Sampai akhir Juni 2022, tercatat mencapai 392.275 kasus dimana Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki jumlah kasus PMK aktif paling banyak. Hal ini yang menjadikan dasar pemerintah provinsi Jawa Timur membuat kebijakan melalui peraturan gubernur Jawa Timur nomor 36 tahun 2022 tentang pedoman penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak. Hal tersebut juga menjadikan acuan untuk pemerintah kabupaten Ponorogo membuat kebijakan terkait PMK karena Kecamatan Pudak yang ada di kabupaten Ponorogo menjadi daerah terinfeksi paling banyak dikarenakan mayoritas masyarakat menjadi peternak sapi.

Dari observasi lapangan yang saya lakukan di kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebanyak kurang lebih 4180 ekor sapi terjangkit PMK dan sekitar 500 ekor mati. Tidak hanya itu saja satuan medis penanganan PMK Kecamatan Pudak kewalahan untuk mendistribusikan vaksin ke hewan ternak kemudian di bantu mahasiswa peternakan dari IPB yang kebetulan KKN di wilayah tersebut. Dari banyaknya kasus tersebut pemerintah Ponorogo menyalurkan bantuan dari kementerian pertanian melalui dinas pertanian dengan nominal jumlah mencapai hampir 10 miliar rupiah, akan tetapi berdasarkan data di lapangan tidak semua peternak mendapatkan bantuan karena dalam satu hari di satu tempat hewan ternak yang mati mencapai 7-9 ekor sapi dan banyak sapi yang belum terdaftar dalam sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia (SIKKNAS) lantaran terganjal regulasi tentang syarat pengajuan bantuan. Selain pemberian vaksin dan bantuan dana, Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat kebijakan untuk mengatur lalu lintas hewan ternak, biosekuriti dan manajemen pengendalian di pasar hewan yang ada di Ponorogo, ini merupakan salah satu langkah awal yang bisa digunakan untuk mengantisipasi semakin meyebarinya penyakit PMK di Ponorogo.

KESIMPULAN

Dalam kasus ini pemerintah memiliki berbagai macam strategi kebijakan guna menanggulangi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dengan cara membentuk tim gugus PMK guna tanggap menangani dan mencegah PMK lalu memberikan pengertian dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada para peternak akan bahayanya PMK, kemudian memperketat jalur jual beli antara pedagang luar daerah agar penularan penyakit mulut dan kuku tidak menyebar di berbagai daerah yang bebas akan PMK, mendata sapi-sapi yang terjangkit PMK dari yang hanya gejala sampai yang parah agar cepat di tanggulangi dengan memisahkan sapi-sapi sesuai gejala yang dialami, memisahkan kandang koloni ternak, melakukan vaksinasi hewan ternak, potong paksa hewan ternak yang sudah parah dan minim kemungkinan untuk sembuh. Dalam kasus ini Pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi masalah yang sedang marak dan merugikan masyarakat dalam skala yang besar, diharapkan pemerintah mampu menanggulangi masalah yang sedang terjadi dengan cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agropustaka. (2022). *Analisis Dampak Penyakit Mulut & Kuku (PMK)*. Agropustaka.Id. Diakses pada 01 November 2022, dari <https://www.agropustaka.id/pemikiran/analisis-dampak-penyakit-mulut-kuku-pmk/>
- Bani, A. U., & Asruddin. (2022). Pendeteksian Penyakit Mulut dan Kuku Pada Sapi dengan Menerapkan Metode Naïve Bayes. *Journal of Computer System and Informatics*, 3(4), 264–268. <https://doi.org/10.47065/josyc.v3i4.1934>
- Detikjatim.com. (2022). *Ribuan Hewan Ternak Kena Penyakit Kuku dan Mulut, Ini Kata Gubernur Khofifah*. Detikjatim.com. Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6066769/ribuan-hewan-ternak-kena-penyakit-kuku-dan-mulut-ini-kata-gubernur-khofifah>
- Diskanak Blora. (2022). *Analisis Dampak Penyakit Mulut & Kuku (PMK)*. Dinas Perikanan Blora. Diakses pada 20 Januari 2023, dari <https://diskanak.batubarakab.go.id/web/mengenal-penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/>
- Distapangan Provinsi Bali. (2022). *Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) – Dinas Perta Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali*. Diakses pada 24 Januari 2023, dari <https://distanpangan.baliprov.go.id/penyakit-mulut-dan-kuku-pmk/>
- Fadli, dr. R. (2022). *penyakit mulut dan kuku*. Halodoc. Diakses pada 25 Januari 2023, dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyakit-mulut-dan-kuku>
- Farda, F. T., Fathul, F., & Santosa, P. E. (2022). Deteksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Pemberian Ransum pada Kambing di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(07), 920–927.
- Gabriella G. Mamoto, Ronny Gosal, D. M. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Hewan Beresiko Rabies Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pertanian Kab. Minahasa Tenggara). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Humas Undip. (2022). *Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak dalam Pandangan Pakar FPP UNDIP - Universitas Diponegoro*. Undip.Ac.Id. Diakses pada 10 Februari 2023, dari <https://www.undip.ac.id/post/24488/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-dalam-pandangan-pakar-fpp-undip.html>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Indonesia. 2022. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Nomor 8387. Kementerian Pertanian Direktorat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Mutia, C. (2022). *Jumlah Hewan Ternak Terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*. Databoks. Diakses pada 24 Maret 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/22/satgas-pmk-hewan-ternak-terjangkit-pmk-tembus-538-ribu-kasus-kamis-22-92022>
- Rohma, M. R., Zamzami, A., Putri, H. U., Adelia, H. K., & Desy Cahya, dan W. (2022). *Kasus penyakit mulut dan kuku di Indonesia: epidemiologi, diagnosis penyakit, angka kejadian, dampak penyakit, dan pengendalian Foot and Mouth Disease Virus cases in Indonesia: Epidemiology, disease diagnosis, incidence rate, disease impact, and treatment*. 15–22. <https://doi.org/10.25047/animpro.2022.331>
- Sudarno, A. (2022). Mentan: Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Turun 99,9 Persen. *Liputan6.com*. Diakses pada 15 Februari 2023, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5165323/mentan-kasus-penyakit-mulut-dan-kuku-hewan-turun-999-persen>
- Wahyudi, E. (2022). Kementan Perkirakan Kerugian Ekonomi Akibat PMK Melebihi Rp9,9

Triliun. *Fortuneidn*. Diakses pada 11 februari 2023, dari <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/kementan-perkiraan-kerugian-ekonomi-akibat-pmk-melebihi-rp9-9-triliun>

Zali, M., Marheni, D. A., Nurlaila, S., & Purdiyan, J. (2022). Desa Tangguh Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Berbasis Peternakan Rakyat. *AMB Mengabdi*, 09 (02), 114-126